

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : DARYAMURNI
NIK : 1377010603650001
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 6 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpnn@kpk.go.id | <https://elhkpnn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DARYAMURNI
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 425375

II. DATA HARTA

		Rp.	
A. TANAH DAN BANGUNAN		950.000.000	
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 447 m ² /84 m ² di KAB / KOTA KOTA PARIAMAN , HASIL SENDIRI	Rp. 950.000.000	
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		98.950.000	
1.	MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 1996, HASIL SENDIRI		
	Rp. 950.000		
2.	MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI		
	Rp. 70.000.000		
3.	MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI		
	Rp. 11.500.000		
4.	MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI		
	Rp. 16.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		---	
D. SURAT BERHARGA		---	
E. KAS DAN SETARA KAS		5.253.697	
F. HARTA LAINNYA		---	
Sub Total		1.054.203.697	
III. HUTANG		811.170.344	
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		243.033.353	

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.